

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Struktur *asset* dan *liabilities* sebuah bank merupakan salah satu dari petunjuk yang menentukan besarnya tingkat risiko yang dihadapinya. Tingkat pertumbuhan besaran neraca yang mempengaruhi komposisi dari unsur-unsur yang terdapat pada sisi aktiva dan pasiva merupakan aspek penting yang perlu dimonitor dalam proses pengendalian risiko. Terutama untuk mewaspadaai kemungkinan akan terjadinya hubungan korelasi yang negatif antara pertumbuhan nilai neraca dan kemampuan bank melakukan penyesuaian atas besaran modal yang diperlukan untuk mengakomodasinya. Risiko inilah yang pernah dialami oleh perbankan nasional ketika nilai neraca dari komponen yang mengandung unsur valas meningkat sebagai akibat dari jatuhnya nilai tukar rupiah. Ternyata, kenaikan itu tidak dapat diakomodasi oleh pemegang saham bank untuk menambah modal. Terdapatnya keterbatasan factor pemegang saham untuk menambah modal dalam kondisi krisis moneter yang parah itulah yang pada akhirnya memaksa pemerintah melancarkan program Rekapitalisasi Perbankan nasional.

Dalam mengelola aktiva dan pasiva, manajemen dalam perbankan harus melakukan dengan cermat dan harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian karena bisnis perbankan senantiasa dihadapkan pada risiko, baik yang diakibatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Jika bank keliru dalam menerapkan

kebijakan pengelolaan aktiva pasivanya, maka bank akan menanggung risiko yang besar. Oleh karena itu, adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan aktiva pasivanya.

Manajemen aktiva-pasiva atau *Asset-Liability Management* (ALMA) merupakan fokus utama dalam manajemen bank umum. *Asset-liability management* menurut Raflus, pada dasarnya adalah proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen dengan selalu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi bank, baik yang berasal dari luar ataupun faktor struktural dari dalam bank. Selain itu, *Asset-liability management* juga memfokuskan pada koordinasi portofolio aset/ liabilitas bank guna memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Yang termasuk dalam pengelolaan aset dan likuiditas bank adalah aspek manajemen likuiditas, manajemen harga, dan manajemen dana. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa *asset-liability management* berpengaruh terhadap hasil usaha sebagai keuntungan (*profitability*) bank (Sri Minarti, 2006:35)

Usaha dalam menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas, bank tidak terlepas dari *Asset Liability Management* yang dikelola oleh *Asset Liability Management Committee*. *Asset Liability Management Committee* berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam menentukan tingkat bunga *lending* dan *funding* bank yang bersangkutan, karena yang menjalankan ALMA (*Asset liability management*) adalah ALCO (*Asset Liability Committee*). Salah satu fungsi dari

*Asset liability management* adalah untuk meningkatkan portofolio neraca bank serta memaksimalkan profit dan risiko yang dapat diterima.

Pelaksanaan program pembangunan Indonesia diadakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai kegiatan yang produktif untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Stabilitas perekonomian Indonesia membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga keuangan bank. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien

Di Indonesia ada beberapa jenis bank, namun jika ditinjau dari segi kepemilikannya, maka jenis bank yang tergolong di dalamnya ialah Bank BUMN, Bank Pemerintah Daerah (BPD), Bank Milik Swasta Nasional, Bank milik Swasta Campuran, dan Bank Milik Asing (Dendawijaya, 2009:15).

Bank milik Pemerintah Daerah atau yang umum dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan jenis bank yang tergolong berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional dan regional di Indonesia. Hal tersebut dapat diukur dari kinerja BPD selama tahun 2011 yang mengalami perbaikan. Sejauh ini bila dilihat dari segi keuntungan sudah cukup signifikan pertumbuhannya. Namun, dari segi peran pembiayaan di daerah masing-masing

memang masih bervariasi, hal ini dikarenakan ada BPD yang masih besar porsiya memberikan kredit konsumsi yang tentunya tingkat pengembaliannya berdampak pada likuiditas BPD itu sendiri. Selain itu, kendala lain yang menghambat pertumbuhan BPD adalah minimnya modal yang dimiliki BPD saat ini. Namun kendala ini diharapkan menjadi pendorong BPD untuk terus meningkatkan kinerja perbankan sehingga BPD dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

Bank apapun jenisnya (umum maupun syariah) berorientasi pada perolehan laba (*profit*), sehingga dalam operasionalnya bank harus dapat menjaga kinerja keuangan dengan baik, terutama tingkat profitabilitas dan likuiditas. Bank dalam pelaksanaan kegiatan operasional, sangat membutuhkan permodalan yang kuat demi terbangunnya kondisi bank yang dipercaya masyarakat. Pembangunan citra bank yang terpercaya, lebih didasarkan karena bank merupakan lembaga kepercayaan. Pembangunan citra tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perwujudan komitmen tersebut dilakukan bank dengan menyediakan permodalan yang memadai, sarana manajemen permodalan yang dapat mengembangkan *earnng asste*, dan dapat menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas. Pemenuhan komitmen tersebut menunjukkan upaya yang besar pada perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup atau alat likuid untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya dalam waktu bersamaan.

Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari bunga atas kredit yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan lain juga berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposito (simpanan masyarakat) pada suatu bank, maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko likuiditas yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Keadaan likuiditas bank yang baik ialah ketika suatu bank memiliki jumlah aset likuid yang dapat menutupi kewajiban jangka pendek dan penarikan dana oleh deposan. Sebagai lembaga perbankan, di satu sisi bank harus menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya seperti giro, deposito, tabungan, dan lainnya. Sementara di sisi lain bank harus menjaga penarikan permintaan dana seperti kredit yang diberikan, pembelian peralatan dan lainnya (Rusyamsi, 1999: 37). Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Menurut Bank Indonesia terdapat beberapa klasifikasi risiko yang kemungkinan dihadapi oleh industri perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Risiko bank merupakan kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank.

Dampak yang muncul ialah dampak yang menguntungkan atau mengancam sebuah kesuksesan.

Risiko likuiditas adalah eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang signifikan, hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang rupiah yang sangat besar (Tampubolon, 2004:26). Bank harus terus memantau posisi likuiditas dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Memiliki jumlah aset dan dana pihak ketiga yang cukup baik belum tentu tidak berpengaruh terhadap terjadinya risiko likuiditas pada suatu bank, karena bank dapat dinilai rentan terhadap risiko likuiditas yaitu dengan cara melihat apakah bank tersebut memiliki aset lancar yang melebihi kewajiban jangka pendeknya dan memenuhi penarikan dana oleh deposan. Berikut data tingkat risiko likuiditas yang ada pada beberapa BPD yang memiliki beragam aset lancar, dana pihak ketiga dan kewajiban jangka pendek pada tahun 2011.

**Tabel 1.1. Tingkat Risiko Likuiditas Beberapa BPD dengan Jumlah Aset, kewajiban jangka pendek dan DPK yang beragam Pada Tahun 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Bank</b>	<b>Aset Likuid</b>	<b>Liabilitas Segera</b>	<b>DPK</b>	<b>Risiko Likuiditas</b>
Bank BJB	16,214,193	8,108,438	37,008,489	22%
Bank Jateng	8,824,640	165,973	19,312,397	45%
Bank Kaltim	9,802,718	617,331	18,663,789	49%
Bank DKI	6,953,158	1,494,661	15,298,882	36%
Bank Riaukepri	8,298,626	2,020,293	12,849,882	49%
Bank Sulselbar	1,825,347	839,621	5,153,476	19%

**Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2011 (Bank BJB, Bank Jateng, Bank Kaltim, Bank DKI, Bank Riaukepri, dan Bank Sulselbar, data diolah kembali)**

Semakin tinggi angka risiko likuiditas maka semakin likuid bank tersebut Kasmir (2007: 268). Berdasarkan data di atas, secara berurutan bahwa Bank Kaltim, Bank Riaukepri, dan Bank Jateng memperlihatkan angka risiko likuiditas yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank tersebut memiliki keadaan likuiditas yang aman, karena masing-masing bank tersebut memiliki aset lancar yang tergolong tinggi yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang tergolong rendah. Jumlah aset lancar yang tersisa setelah membayar kewajiban jangka pendek tersebut berkisar 40% lebih dari jumlah dana pihak ketiga awal yang dihimpun oleh bank, hal itu menunjukkan bahwa dengan aset lancar yang

tersisa, bank masih mampu memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Asset-Liability Management adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang diancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian dari definisi ini. Namun, lembaga keuangan mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan dan pelayanan, seimbang dengan faktor lain. Dengan demikian tujuan dari ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang (Ali, 2004). Selain itu ALMA diterapkan agar bank memperoleh *net income* yang optimal bagi bank dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan pasiva bank, diharapkan bank dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut.

Laporan keuangan atau hasil olah informasi keuangan mempunyai fokus menyediakan informasi keuangan bagi kepentingan pihak internal (manajemen) bank. Akuntansi manajemen berhubungan dengan informasi mengenai bank untuk memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan yang merupakan pihak internal bank (manajemen) sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber dana.

Fungsi laporan keuangan bagi manajemen bank yaitu sebagai alat analisis dalam menilai kondisi/kesehatan keuangan suatu bank untuk kemudian diambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber dana (aktiva dan



pasiva) yang ada. Alat analisis yang biasa digunakan bank tersebut adalah Rasio Keuangan bank.

Rasio yang biasanya digunakan dalam perbankan untuk mengukur likuiditas suatu bank ialah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2009: 116). Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit relatif dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Bank sangat mungkin mengalami keadaan tidak likuid (*illiquidity*) yakni ketika arus kas keluarnya (penarikan deposito oleh nasabah, pemberian kredit, dan lainnya) jauh lebih besar daripada arus kas masuk (Siahaan, 2009: 134). Namun perlu diperhatikan tentang pemberian sebuah kredit, bank tentu harus tetap menjaga likuiditasnya, karena kredit yang diberikan ke masyarakat berisiko macet, jika hal itu terjadi maka semakin besar risiko likuiditas yang akan ditanggung oleh bank karena akan mengurangi jumlah dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk itu pengukuran *Non Performing Loan* (NPL) sangatlah penting untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank.

Pembahasan risiko likuiditas ini, dicakup dalam Pilar 2 Basel II Accord, dimana salah satu diantara jenis-jenis risiko yang diantisipasi dalam perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah risiko likuiditas. Penting diingat, bahwa dengan penambahan modal bukanlah satu-satunya pilihan untuk dapat mengantisipasi risiko. Hal utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan

kualitas manajemen risiko, yaitu antara lain melalui penetapan limit internal, pemeliharaan alat likuid yang cukup, serta perbaikan internal kontrol sebagaimana rekomendasi Basel di atas (Ali, 2004: 65).

Guna mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank akan berusaha menggunakannya ke aset yang menghasilkan bunga yang tinggi, aset jangka panjang dan dengan harapan bahwa operasi harian akan tertutup dengan dana baru. Namun tindakan seperti ini sangat berisiko karena apabila dana yang telanjur digunakan tidak dapat ditarik, sedangkan dana baru yang diharapkan tidak tersedia, bagaimana suatu bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memenuhi penarikan dana oleh deposan, pada akhirnya akan menimbulkan masalah likuiditas (Rusyamsi, 1999:38).

Tanggung jawab yang besar pada pihak manajemen bank. sangat penting diperhatikan dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan aset dan liabilitas yang dimiliki. Semakin baik pengelolaan aset dan liabilitas bank, ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat profit dalam kinerja perbankan serta semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank. ALMA sebagai salah satu alat analisis dan pengelolaan operasional perbankan. merupakan salah satu yang menjadi perhatian praktisi dan akademisi perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun melakukan suatu penelitian lebih komprehensif pada objek dan waktu yang berbeda yaitu dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerapan Asset-Liability Manajemen (ALMA) Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se- Indonesia Tahun 2012-2014”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan ke masyarakat dan sumber dana terbesar suatu bank berasal dari masyarakat (DPK) digolongkan sebagai sumber pendapatan terbesar suatu bank, sehingga aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan fungsi utama suatu bank. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit (simpanan masyarakat) serta modal sendiri pada suatu bank, maka akan membawa konsekuensi semakin rentannya risiko likuiditas yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, oleh sebab itu seharusnya suatu bank wajib mengambil keputusan/kebijakan terbaik mengenai Asset-Liability Manajemen (ALMA) suatu bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, analisis tingkat risiko likuiditas dinilai dari rasio-rasio keuangan perbankan (beberapa rasio CAMEL), manajemen likuiditas dalam hal ini menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), manajemen kualitas aktiva produktif dalam hal ini *Non Performing Loan* (NPL) dan manajemen kecukupan modal dalam hal ini *Capital Adequacy Ratio* (CAR). ketiga rasio tersebut merupakan alat ukur kinerja dalam penerapan ALMA yang telah dilakukan pada BPD se-Indonesia. Maka dalam penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan seperti :

1. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Likuiditas Pada BPD se-Indonesia pada tahun 2012- 2014?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Likuiditas Pada BPD se-Indonesia pada tahun 2012- 2014?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Likuiditas Pada BPD se-Indonesia pada tahun 2012- 2014?
4. Apakah rasio LDR, NPL, dan CAR secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Risiko Likuiditas Pada BPD se-Indonesia pada tahun 2012- 2014?
5. Diantara LDR , NPL dan CAR variabel manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap Risiko Likuiditas pada BPD se-Indonesia pada tahun 2012- 2014?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti tidak membahas semua masalah yang ditemukan. tetapi peneliti hanya membatasi pada pengaruh *Asset-liability manajemen* terhadap tingkat likuiditas perbankan dengan menggunakan tiga rasio CAMEL (*Capital, Asset, management, earning, liquidity*) antara lain *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mewakili Manajemen Likuiditas, *Non Performing Loan* (NPL) untuk mewakili Manajemen Kualitas Aktiva Produktif, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mewakili Manajemen Keukupan Modal. ketiga-tiganya merupakan

konsentrasi pembahasan mengenai *Asset-liability Manajemen* (ALMA), Serta konsentrasi pada *Risiko Likuiditas* yang menggambarkan eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo dari sebanyak 26 sampel Bank yang merupakan anggota dari Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang ada di seluruh Indonesia periode tahun 2012-2014.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen likuiditas dalam hal ini LDR (*Loan to Deposit Ratio*) terhadap Risiko Likuiditas pada BPD di Indonesia periode 2012-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen kualitas aktiva produktif dalam hal ini NPL (*Non Performing Loan*) terhadap Risiko Likuiditas pada BPD di Indonesia periode 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Kecukupan Modal (solvabilitas), dalam hal ini CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Risiko Likuiditas pada BPD di Indonesia periode 2012-2014.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh rasio LDR, NPL, dan CAR secara bersamaan terhadap Risiko Likuiditas pada BPD di Indonesia periode 2012-2014.
5. Untuk mengetahui diantara LDR, NPL dan CAR variabel mana yang paling berpengaruh dominan terhadap Risiko Likuiditas pada BPD di Indonesia periode 2012-2014.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh penerapan Asset-Liability Manajemen (ALMA) yang dilihat dari rasio LDR, NPL dan CAR terhadap Risiko Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Tahun 2012-2014. Selain itu memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan:

#### **1. Bagi Manajemen dan Investor**

Dengan adanya penelitian mengenai variabel-variabel yang bisa mempengaruhi risiko likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, maka akan diketahui variabel-variabel apa saja yang bisa mempengaruhi risiko likuiditas secara signifikan untuk selanjutnya diambil keputusan maupun kebijakan dalam pengelolaan aktiva pasiva guna mencapai harapan atau tujuan yang diinginkan.

#### **2. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi risiko likuiditas yang kemungkinan terjadi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga akan lebih

memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa dari bank tersebut.

Universitas Tanjungpura